

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. 1. Tinjauan Umum Kejahatan Genosida

2.1.1 Genosida Adalah Pelanggaran HAM Berat

Dalam yurisdiksi International Criminal Court, genosida merupakan salah satu dari empat pelanggaran HAM terberat selain kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi. Secara yuridis, definisi genosida terdapat dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida tahun 1948 (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) yang didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian suatu kelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. Konvensi ini kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC dan kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kata genosida sendiri pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum berketurunan Polandia dan Yahudi bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944 dalam bukunya yang berjudul *Axis Rule in Occupied Europe*.¹ Genosida merupakan sebuah kata yang mewakili suatu tindak kekerasan dalam bentuk pembantaian besar-besaran terhadap suatu suku bangsa ras, ataupun kelompok dengan tujuan untuk memusnahkan bangsa atau etnis tersebut. Kekerasan genosida ini merupakan permasalahan yang sudah menjadi pembahasan dalam hukum internasional sejak pertengahan tahun 1940-an.

¹Raphael Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress*. www.preventgenocide.org/lemkin/AxisRule1944-1.htm, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 02.01 wib

Dalam Konvensi Genosida 1948 disebutkan bahwa genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut, yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama seperti:

- a) Membunuh para anggota kelompok;
- b) Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
- c) Dengan sengaja menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
- d) Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;
- e) Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain.²

Dalam point (a) istilah “membunuh”, elemen-elemen kejahatan genosida yang menurut Komisi Pidana Internasional adalah membunuh anggota-anggota kelompok, yaitu pembunuhan langsung dan tindakan-tindakan yang “menyebabkan kematian”.

Menyebabkan luka-luka atau penderitaan secara fisik atau mental terhadap anggota kelompok yaitu juga dimaksud yang menyebabkan trauma pada anggota-anggota kelompok melalui perkosaan penyiksaan, mutilasi, pemaksaan penggunaan obat-obat dan kekerasan seksual yang meluas.

Selanjutnya, pengertian “dengan sengaja menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya”, adalah termasuk dengan sengaja menciptakan keadaan yang membuat sangat susah untuk

²Pasal 2 Konvensi Genosida 1948

bertahan hidup seperti, menghilangkan sumber- sumber yang digunakan untuk kelangsungan hidup seperti air bersih, makanan, pakaian, tempat perlindungan atau perawatan medis. Penghilangan sumber- sumber kelangsungan hidup juga dapat dilakukan melalui pengambilan hasil panen, pemblokiran bahan makanan, penahanan didalam kamp-kamp, atau pemindahan atau pengusiran secara paksa.

Sedangkan pencegahan kelahiran adalah termasuk sterilisasi diluar kemauan, pengguguran secara paksa, larangan kawin, dan pemisahan pria dan wanita dalam jangka waktu lama atau bahkan pembunuhan bayi yang baru lahir dengan maksud untuk mencegah berkembangbiakan kelompok.

Pemindahan secara paksa terhadap anak-anak, dapat dilakukan melalui paksaan secara langsung atau tidak langsung. Dapat melalui rasa takut adanya kekerasan, paksaan, penangkapan, tekanan psikologi atau metode-metode paksaan lainnya.

Dalam konvensi genosida ini, yang membahas tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida atau yang lebih dikenal dengan *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (CPPCG) lebih rinci mendefinisikan genosida sebagai tindakan-tindakan berikut ini;

- a. Dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, nasional, etnis, ras atau kelompok agama.
- b. Dengan demikian: membunuh anggota kelompok.
- c. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok.
- d. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya.
- e. Melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok.

- f. Memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.³

Diatas dijelaskan satu kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Kelompok bangsa yang dimaksud adalah kelompok bangsa yang terdiri dari sekumpulan individu-individu yang memiliki identitas berbeda, yang identitasnya ditetapkan melalui suatu tanah air bersama dari bangsa atau asal usul bangsa. Kelompok ras berarti sekumpulan individu-individu yang identitasnya ditetapkan melalui sifat-sifat atau ciri-ciri fisik secara turun-temurun. Kelompok etnis merujuk pada kumpulan individu-individu yang memiliki satu tradisi atau kebudayaan yang sama, bahasa bersama dan satu warisan bersama. Sedangkan kelompok agama adalah sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang sama.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 atau Konvensi Genosida disepakati pada tahun 1948 hingga sekarang merupakan dokumen komprehensif tentang genosida yang pernah ditandatangani negara-negara di dunia. Melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 260 (III) A pada tanggal 9 Desember 1948 konvensi ini diterima oleh negara-negara dan mulai berlaku efektif pada tanggal 12 Januari 1951.⁴

Genosida merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang biasanya berawal dari sifat rasisme, lalu berujung pembantaian secara besar-besaran dengan tujuan untuk memusnahkan seluruh ataupun sebagian dari suatu suku bangsa, ras, etnis, ataupun agama karena mereka dianggap lebih rendah dari kaum yang melakukan penindasan dan tidak pantas untuk hidup. Jadi mereka melakukan eliminasi terhadap kaum-kaum yang

³Diakses dari *Office of the High Commissioner for Human Rights. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. <http://www.preventgenocide.org/ab/1998/>, tanggal 21 Oktober 2017, pukul 02.30 wib.

⁴Diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx>, tanggal 21 Oktober 2017, pukul 02.35 wib.

dianggap lebih rendah, tidak pantas untuk hidup ,tidak pantas untuk lebih berkuasa, dan dianggap tidak pantas hidup dalam satu wilayah bersama kaum yang menindas.

Tindakan ini tentunya adalah tindakan yang sangat keji dan melanggar hukum internasional.Tindakan ini mempunyai efek yang sangat merugikansekali bagi kelompok yang terkena genosida.Mereka kehilangan harta benda, keluarga, bahkan nyawa mereka.Tindakan ini adalah tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia dan menjatuhkan banyak sekali korban yang tidak bersalah. Ini adalah contoh tindakan yang hanyamementingkan egoisme tanpa memandang hak-hak asasi yang dimiliki orang lain,atau lebih spesifiknya hak-hak kelompok yang dibantai tersebut.

Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan atau *Crimes Against Humanity*. Perbedaannya terletak pada beberapa tempat, pertama korban kejahatan genosida dikategorikan sebagai bagian dari satu dari keempat jenis kelompok yaitu etnis, bangsa, agaman, atau ras, sedangkan para korban “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah biasanya warga negara, dan penduduk sipil. Kedua, disatu pihak, genosida mensyaratkan “bermaksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian” satu dari keempat jenis kejahatan yang sudah dijelaskan di Pasal 2 Konvensi genosida.Sedangkan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan tidak ada syarat khusus.

Pada tahun 2002 PBB memutuskan untuk membentuk *International Criminal Court* (ICC) atau biasa disebut Pengadilan Kriminal International merupakan sebuah lembaga yang berdiri dibawah organisasi PBB. ICC dibentuk sebagai "tribunal" permanen untuk menuntut

individual untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagai mana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional.⁵

Tujuan dari dirancangnya ICC ini adalah untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada namun pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya jika hanya pengadilan negara tidak mau atau dirasa tidak mampu untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, dan menjadi "pengadilan usaha terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual.⁶

Keharusan mengadili pelaku kejahatan genosida (kejahatan perang) yang dilakukan selama Perang Dunia II, oleh karena kejahatan tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertentangan dengan persyaratan- persyaratan mendasar dari ketentuan hukum perang.⁷

Sebagai contoh, kejahatan genosida yang dilakukan terhadap etnis Yahudi di negara-negara dibawah kekuasaan negara poros yang telah membantai lebih dari 9 juta kaum Yahudi.⁸

Perlakuan tersebut melanggar ketentuan tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, jugamerupakan pelanggaran berat (*grave breaches*) sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.⁹

⁵Diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/topics/42a30948-3985-4ec1-acea-76334a53b054>, tanggal 21 Oktober, pukul 02.45 wib.

⁶*Ibid.*, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 02.46 wib.

⁷Timothy L. H. McCormack & Gerry Simpson (Ed), *The Law of War Crimes, National & International Approaches*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, hlm. 14.

⁸Peter I. Rose, *They and We, Racial And Ethnic Relations In The United States*, Fifth Edition, The McGraw-Hill Companies Inc., New York. 1997, hlm. 158.

⁹Maria-Claude Roberge, "Jurisdiction of the Ad Hoc Tribunal for the Former Yugoslavia And Rwanda Over Crimes Against Humanity And Genocide", dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 321, November-Desember, 1997, hlm. 652.

Kasus genosida yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia seringkali banyak yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. Hal ini mungkin dikarenakan ICC atau pengadilan kriminal internasional baru pada tahun 2002. Sedangkan kasus genosida sendiri pertama kali sudah terjadi sejak milenium pertama sebelum masehi dan sejak itu banyak kasus genosida—genosida lainnya yang terjadi dan tercatat di dalam sejarah. Seperti contoh kasus yang sudah dijadikan contoh diatas yaitu genosida yang paling terkenal dan memakan banyak sekali korban jiwa, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh Nazi pada masa Perang Dunia II.

Faktor lain yang membuat suatu kasus genosida tidak dapat terselesaikan secara tuntas, yaitu apabila suatu kasus genosida tidak dianggap dan tidak diputuskan sebagai genosida oleh PBB. Hal seperti itu lah yang menghambat kasus genosida di pengadilan internasional, yaitu karena kasus itu masih diperdebatkan berupa kejahatan genosida atau bukan. Seperti contoh yang terjadi di Darfur, Sudan. Pembantaian kaum kulit hitam oleh milisi Janjaweed di Sudan ini sudah dianggap kasus genosida oleh pemerintah Amerika Serikat namun tidak oleh PBB.¹⁰

2.1.2 Pencegahan Kejahatan Genosida

Gregory Stanton dalam tulisannya menjelaskan adanya tujuh langkah untuk mencegah kejahatan genosida.

1. **Klasifikasi:** Jika adanya bangsa yang dibagi ke dalam “kita dan mereka” maka tindakan pencegahan utama pada tingkat awal ini adalah mengembangkan lembaga-lembaga yang universalistik yang transendental (*to develop universalistic institutions that transcends*).
2. **Simbolisasi:** Ketika simbolisasi dikombinasikan dengan kebencian, simbol-simbol akan dipaksakan atas ketidakmauan anggota-anggota kelompok lain. Untuk melawan

¹⁰Glenn Kessler dan Colum Lynch, *U.S. Calls Killings in Sudan Genocide*, The Washington Post, 10 September 2004, hal. A02.

atau memberantas simbolisasi, simbol-simbol kebencian dapat dilarang secara hukum (*to combat symbolization, hate symbols can be legally forbidden*).

3. **Organisasi:** Kejahatan genosida yang terorganisir. Unit-unit tentara khusus atau milisi sering dilatih dan dipersenjatai maka dari itu anggota unit atau milisi seperti itu harus dilarang (*membership in these militias should be outlawed*).
4. **Polarisasi:** Adanya kelompok-kelompok yang menyiarkan/menabur kebencian melalui propaganda. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan keamanan kepada pemimpin-pemimpin moderat atau bantuan untuk kelompok HAM. (*security protection for moderate leaders or assistance to human rights group*)
5. **Identifikasi:** Korban-korban diidentifikasi dan dipisahkan karena identitas etnik atau agama mereka (*victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity*).
6. **Pemusnahan:** Pada langkah ini, hanya intervensi militer yang cepat dan besar yang dapat menghentikan genosida (*only rapid and overwhelming armed intervention can stop genocide*).
7. **Penyangkalan:** Pelaku-pelaku genosida menyangkal bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Respon bagi penyangkalan itu adalah penghukuman melalui suatu Mahkamah internasional atau nasional (*the response to denial is punishment by an international tribunal or national courts*)¹¹

2.2 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

¹¹ Gregory Stanton. *The Seven Stages of Genocide*, Washington, D.C. 1998, hlm. 9.

2.2.1 Teori Hak asasi Manusia

Pada tanggal 10 Desember 1948 PBB memproklamkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUNHAM). Dalam DUNHAM terdapat 30 pasal yang menguraikan tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Menurut Jerome J. Shestack, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan untuk suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan sumbernya adalah langsung dari Tuhan (*Supreme Being*). Namun istilah 'HAM' tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional manapun. Sudah pasti, teori ini mengandaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM.¹²

Hak Asasi Manusia atau *Human Rights* adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan anugerah Tuhan yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi perlindungan serta kehormatan harkat martabat manusia.¹³

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa HAM adalah hak yang fundamental. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1:

“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan.”

¹²Vide Jerome J. Shestack, *Jurisprudence of Human Rights*, dalam Theodor Meron, (edit.), *Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*, New York: Oxford University Press, 1992, hlm. 76.

¹³Michael W. Giles and Arthur Evans, “*The Power Approach to Intergroup Hostility*”, *Journal of Conflict Resolution*, vol. 30, no. 3, 1986

Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang berisifat kodrati dan fundamental.

Menurut John Locke hak asasi manusia adalah suatu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.Oleh karena itu idak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak tersebut.Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan suatu hak yang sudah kodrati dan berarti tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁴

Dalam persoalan HAM, ada beberapa teori yang penting dan relevan, antara lain, yaitu: “teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*), dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).”¹⁵

Teori hak-hak yang kodrati menegaskan bahwa HAM adalah suatu hak-hak yang sepantasnya dimiliki oleh semua orang pada setiap saat dan di setiap tempat karena dilahirkan sebagai manusia.HAM bersifat universal sehingga pengakuan dari pemerintah atau dari suatu system hukum tidak dibutuhkan oleh HAM.Karena hal ini, sumber HAM sesungguhnya berasal dari manusia.¹⁶

Penganut teori positivis berpendapat bahwa hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum, atau kontrak.Kaum positivis berpendapat sesungguhnya suatu eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari suatu hukum negara.Sedangkan penganut teori retivisme budaya, berpendapat bahwa tidak ada suatu hak yang bersifat universal.Bahwa hak-hak yang dimiliki seluruh manusia berlaku setiap saat dan di setiap tempat

¹⁴Masyhur Effendi. **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

¹⁵Sujatmoko Andre, **Hukum HAM Dan Hukum Humaniter**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm, 8.

¹⁶Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, 1966-1990, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15-16.

merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara social (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).¹⁷

HAM pada hakikatnya harus dihormati dan dilindungi untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.¹⁸

Mengenai prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum HAM internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principles of law*) yang merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama, di samping perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi dan doktrin.¹⁹

Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional diperlukan dua hal penting, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional. Dengan begitu, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Pada kenyataannya, hal itu kemudian dielaborasi ke dalam berbagai instrument hukum HAM internasional, sebagai contoh misalnya perjanjian internasional.²⁰

Menurut Rhons K.M. Smith prinsip hak asasi manusia ada tiga, yaitu, kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban positif setiap Negara. Prinsip kesetaraan, larangan dalam

¹⁷*Ibid*, hlm. 18.

¹⁸Tim ICCE UIN Jakarta. **Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hal. 201.

¹⁹Andrey Sujatmoko, Sejarah, “**Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM**”, Makalah, h. 9.

²⁰*Ibid.*, hlm 10.

diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu yang lebih luas. Ketiga prinsip-prinsip tersebut telah sangat menjiwai HAM dan terdapat hamper pada semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas.²¹

Pelarangan diskriminasi adalah salah satu bagian penting dalam prinsip kesetaraan. Jika semua orang dibilang setara, seharusnya tidak ada diskriminasi. Tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap siapapun dikarenakan semua orang sama dan sederajat. Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip non-diskriminatif. Prinsip ini sudah ditegaskan dalam Piagam PBB dan dalam “*International Bill of Human Rights*”. Yaitu UDHR, ICCPR, dan ICESR, prinsip ini dimuat secara tegas.²²

Prinsip kewajiban positif negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (*right bearer*) sedangkan Negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk: melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), dan memenuhi (*fulfill*) HAM setiap individu.²³

Berdirinya PBB pada tahun 1945 merupakan saat yang sangat berperan dalam eksistensi HAM. Selain itu, dibentuknya PBB merefleksikan komitmen dari masyarakat internasional di sejumlah besar Negara menyangkut HAM. Hal ini terlihat dari isi pada piagam PBB yang juga mengatur ketentuan-ketentuan mengenai HAM.

2.2.2 Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Berat HAM

²¹Rhona K. M. Smith, *et. al.*, *op.cit.*, hlm. 39.

²²Sujatmoko Andrey, *op.cit.*, hlm. 11.

²³Sujatmoko Andrey, *op.cit.*, hlm. 12.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi 2 macam pelanggaran yaitu: pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat.

Menurut Victor Conde, dalam bukunya “*A Handbook of Human Rights Terminology*” menyatakan apa yang dimaksud pelanggaran HAM adalah pelanggaran yang ditunjukan kepada suatu norma HAM atau perjanjian Internasional (*treaty*) HAM, bahwa kegagalan dari negara atau pihak-pihak yang secara hukum mempunyai kewajiban untuk mematuhi norma-norma HAM internasional. Victor dalam bukunya menyatakan selengkapnya:²⁴

‘Violation (of a norm/treaty): a failure of a conduct of another party legally obligated to comply with international human right norms. Failure to fulfill an obligation is a violation of that obligation. A violation gives rise to domestic or international remedies for such state conduct’.

Pada bagian frase “*for such state conduct*” dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM akan senantiasa dilakukan oleh negara (state) yang tentu akan dioperasikan oleh segenap aparturnya (state agents). Hal lain yang dapat terjadi adalah pelakunya bukan negara tetapi jika dilakukan atas perintah dari negara yang berarti dikerjakan atas nama negara atau dalam rangka menjalankan kewenangan yang diberikan dari negara, maka hal tersebut juga akan menjadi pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM (*violations of human rights*) akan selalu berkaitan dengan kewajiban negara atau pihak-pihak yang secara hukum mempunyai kewajiban untuk

²⁴H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, Lincoln NE: Universitas of Nebraska Press, 1999, hlm. 156.

melindungi (*safeguarding*) dan menghormati (*respecting*) norma-norma HAM internasional.²⁵

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa yang dimaksud pelanggaran HAM adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu, atau kelompok individu terhadap orang lain, terlepas apakah pelakunya tersebut terkait dengan kekuasaan (*authority*) dan/ atau pelaku tersebut sedang menjalankan kewenangan sebagai aparatur Negara (*state agent*).

Pada hakikatnya menurut Muladi, pelanggaran HAM mempunyai suatu nuansa khusus yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang artinya dalam hal ini si para pelaku bertindak dalam konteks pemerintah atau nama pemerintah dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a governmental context and facilitated by government power*). Pelanggaran HAM tersebut pun dilakukan di dalam atau berkaitan dengan kedudukannya (*within or is association with governmental status*).²⁶

Commision on Human Rights of United Nation Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946 secara terperinci menetapkan beberapa hak ekonomi dan sosial serta hak politik. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1948 penetapan tersebut dilanjutkan dengan disusunnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang dinamakan (*Universal Declaration of Human Rights*).²⁷

Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah piagam yang merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam ini

²⁵*Ibid.*, hlm. 32.

²⁶Muladi, **Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia**, Jakarta, The Habibie Center, 2002, hlm 31.

²⁷Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim. *Op. Cit.* hlm. 267.

adalah salah satu cara untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi negara masing-masing.

Atas keberhasilan *Universal Declaration of Human Rights*, hal ini diikuti oleh keberhasilan diterimanya beberapa perjanjian (*Covenant*) tentang HAM yang diakui oleh Hukum internasional dan diratifikasi oleh Negara-negara anggota PBB itu sendiri. Beberapa perjanjian itu seperti: *The International on Civil and Political Rights, Optional Protocol, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*.

Individu adalah pihak yang HAM-nya harus dilindungi oleh negara. Bahwa pada dasarnya berbagai instrument hukum internasional yang berupa perjanjian internasional tentang HAM telah menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM setiap individu. Individu sebagai pihak yang dikarunai HAM secara melekat (*inherent*), berhak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan atas HAM-nya dari negara. Begitulah berbagai ketentuan dalam hukum internasional menempatkan kedudukan negara dan individu dalam kaitan dengan HAM.²⁸

Sudah begitu jelasnya bahwa HAM adalah sesuatu yang sudah diatur secara hukum dan tidak bisa dilanggar. Pada faktanya pelanggaran HAM masih terjadi dimana-mana. Pelanggaran pada hakikatnya merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Aspek luar biasa diindikasikan telah adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menyertai sampai terjadi kejahatan tersebut. Hal ini dapat dengan mudah terjadi, terutama yang biasanya dilakukan oleh mereka yang termasuk sebagai aparaturnegara (*state*

²⁸Sujatmoko Andrey, *op.cit.*, hlm. 34.

agent) yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tertentu dari negara, atau bukan aparatur Negara tetapi bertindak atas nama negara.²⁹

Penguasa dan rakyat memiliki kedudukan yang berbeda dalam hak hak dan kewajiban. Penguasa (negara) yang dipresentasikan melalui pemerintah/eksekutif (termasuk juga legislative dan yudikatif), kemudian dioperasionalisasikan oleh segenap aparaturnya seperti (polisi, hakim, jasa, tentara, dan sebagainya.) adalah pihak yang secara hukum berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM.³⁰

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kealpaan negara (*state omission*) atas kewajiban dalam melindungi, menghormati, dan melindungi HAM kan menimbulkan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu dapat terjadi akibat negara berbuat sesuatu (*violation by commission*) atau dikarenakan negara tidak berbuat sesuatu (*violation by omission*).³¹

Pengertian pelanggaran HAM berat itu sendiri belum mendapat kesepakatan yang diterima secara umum. Biasanya kata ‘berat’ menerangkan kata ‘pelanggaran’, yaitu menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Namun, kata ‘berat’ dalam pelanggaran HAM ini juga berhubungan dengan jenis-jenis HAM yang dilanggar. Pelanggaran HAM berat terjadi jika yang dilanggar adalah hak-hak berjenis *non-derogable*.³²

Pelanggaran HAM Berat mempunyai unsur-unsur yang bersifat secara sistematis dan juga menimbulkan akibat yang meluas atau *widespread*. Hal ini biasanya mengarah kepada jumlah korban yang dalam jumlah sangat besar atau kerusakan serius yang secara luas. Namun,

²⁹*ibid.*, hlm. 31.

³⁰*ibid.*

³¹*ibid.*

³²Ifdal Kashim, **Prinsip-prinsip Van Boven Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat**, Jakarta, 2002, hlm. 23.

hingga saat ini belum ada definisi yang baku mengenai apa sebenarnya definisi pelanggaran HAM Berat. Banyak istilah-istilah yang digunakan, dan peristilahan yang digunakan pun bermacam-macam, contohnya ada istilah *gross and systematic violations*, *the most serious crimes*, *gross violations*, *grave violations*, dan sebagainya.

International Criminal Court (ICC) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 mempunyai yurisdiksi atas kejahatan paling serius yang merupakan kejahatan HAM berat yaitu:³³

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan perang
4. Kejahatan agresi.

Dalam Pasal 5 Statuta Roma dinyatakan bahwa kejahatan HAM berat termasuk dalam yuridiksi ICC, yang mana disebutkan “*the jurisdiction of the court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole...*”

Sedangkan Pengadilan Nurembery menyatakan bahwa Kejahatan berat hak asasi manusia atau pelanggaran HAM berat adalah *genocide*, *War Crime*, dan *Crime Against Humanity* yang juga diatur dalam *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).

Dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagai berikut:³⁴

³³Statuta Roma 1998

1. Kejahatan terhadap perdamaian atau (*Crimes against peace*) yang dikategorikan sebagai kejahatan manusia yaitu : merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau jaminan-jaminan; atau turut serta di dalam rencana bersama atau komplotan untuk mencapai salah satu daripada tujuan perbuatan-perbuatan tersebut di atas.

2. Kejahatan Perang atau (*War Crimes*) yang dikategorikan sebagai kejahatan perang ialah: pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (*murder*), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, memberlakukan kerja paksa, atau di wilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh, atau memperlakukan orang yang berada di laut secara demikian; merampas milik negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan berlebihan atau semena-mena, atau membinasakannya tanpa adanya keperluan militer.

3. Kejahatan terhadap Kemanusiaan atau (*Crimes against humanity*) yang dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah: pembunuhan (*murder*) membinasakan, memperbudak, mengasingkan dan lain-lain kekejaman di luar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaan hak-hak dasar berdasarkan alasan-alasan politik, ras atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir, menghasut dan membantu mereka yang turut serta dalam membentuk atau melaksanakan rencana bersama komplotan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut bertanggungjawab atas perbuatan orang-orang yang melakukan rencana tersebut.

Menurut Pasal 104 ayat (1) UU HAM, pelanggaran HAM Berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

³⁴Pasal 6 Piagam Peradilan Militer Internasional Nuremberg

(*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

2.3 Tinjauan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

2.3.1 Sejarah Berdirinya PBB

United Nations atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) adalah suatu organisasi internasional terbesar dan bersifat universal. Organisasi ini adalah pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa yang putus dari perang dunia kedua. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk memelihara dan menjaga perdamaian serta keamanan internasional. PBB mempunyai anggota mencapai 193 negara hingga saat ini. Sebagai organisasi antarpemerintah, PBB mempunyai akses sumber daya alam yang melimpah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang menjadi korban konflik.³⁵

PBB didirikan di kota San Fransisco pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 setelah berlangsungnya Konferensi Dumbarton Oaks yang dilaksanakan di kota Washington. Namun sidang umum pertama dihadiri dengan perwakilan 51 negara, baru berlangsung pada tanggal

³⁵Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2013, **Hukum Humaniter Internasional**, Jakarta, Rajawali Press, hlm 132-133.

10 Januari 1946 bertempat di Church House, London. Sejak PBB didirikan sampai tahun 2007, telah tercatat sudah ada 192 negara yang telah menjadi anggota PBB. PBB mempunyai markas pertama di kota San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang pusat markas besar PBB terletak di New York.

Nama United Nations atau PBB digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Istilah “*United Nations*” pertama kali dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai istilah menggambarkan negara-negara sekutu sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi dari 51 negara pada tanggal 26 Juni 1945 dan mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan yaitu; Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum pertama dilaksanakan pada 10 Januari 1945 di Church House, London dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan.

PBB memiliki kriteria tidak hanya sebagai public international organization tetapi juga memiliki *legal personality*, yaitu *international legal personality* dan *municipal legal personality* dengan kriteria:³⁶

- a. PBB merupakan organisasi internasional public yang bersifat permanen. Organisasi ini terbentuk dalam perjanjian internasional, dan di dalamnya terdapat organ-organ khusus yang diatur menurut hukum internasional serta mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing.
- b. PBB mempunyai pembagian kewenangan hukumnya dan tujuan masing-masing pada tiap organ-organ di dalamnya dan juga negara anggotanya. PBB mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat anggotanya dan

³⁶Diakses dari <http://dokumen.Tps/documents/legal-personaliy-organisasi-internasional.html> tanggal 24 Desember 2017, pukul 16.22 wib.

dapat mewakili kepentingannya sendiri dalam forum internasional seperti ikut perwakilan dalam suatu perjanjian internasional.

- c. Kewenangan hukum PBB tidak hanya berlaku di sistem nasional pada satu atau beberapa negara tetapi juga dalam di lingkup internasional. PBB mempunyai kapasitas untuk bertindak dalam suatu lingkup internasional.

2.3.2 Keanggotaan PBB

Pengaturan keanggotaan PBB telah diatur dalam bab II pasal 3 sampai dengan pasal 6 Piagam PBB. Ada 2 jenis keanggotaan PBB yaitu:

1. Anggota asli (*original members*) terdiri dari 50 negara yang telah menandatangani Piagam San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945. Ditambah lagi tanggal 15 Oktober 1945 negara Polandia menyusul dan akhirnya menjadi 51 negara. Pasal 3 telah mengatur tentang kedudukan anggota asli atau pemula dari PBB.

Yang termasuk anggota pemula PBB yaitu :

1. Negara-negara yang ikut serta dalam konferensi San Fransisco pada tanggal 25 April 1945.
 2. Negara-negara yang sudah terlebih dahulu menandatangani Deklarasi Washington pada tanggal 1 Januari 1942.
 3. Negara yang pada point 1 dan 2 diatas yang telah menandatangani piagam dan meratifikasinya sesuai dengan pasal 110 Piagam PBB.
2. Anggota tambahan / baru. Pasal 4 telah mengatur untuk penerimaan anggota baru. Bahwa Keanggotaan dalam PBB terbuka untuk semua Negara lain yang cinta damai dan menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB yang berdasarkan

pertimbangan organisasi PBB sanggup dan bersedia menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan negara-negara yang ingin bergabung menjadi anggota PBB yang masuk kemudian harus berdasarkan syarat-syarat yang disetujui oleh Majelis Umum PBB.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.³⁷

- a) Negara yang merdeka.
- b) Negara yang mencintai damai.
- c) Negara yang sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Piagam PBB.
- d) Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

Sampai saat ini anggota Negara PBB sudah mencapai 193 anggota Negara.

2.3.3 Asas Dan Tujuan PBB

Dalam Pasal 2 piagam PBB dijelaskan tentang asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:

1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. Bahwa semua anggota PBB sama-sama berdaulat dan memiliki derajat yang sama juga memiliki satu suara, terkecuali dalam keanggotaan Dewan Keamanan yang menetapkan adanya hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap.
2. *Asas Pacta Sunt Servanda* yaitu persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai. Damai disini adalah penyelesaian yang tidak mengancam perdamaian internasional, keamanan internasional, dan keadilan internasional.

³⁷Diakses dari <https://dokumen.tips/documents/proses-masuknya-negara-menjadi-anggota-pbb.html>, tanggal 08 November 2018, pukul. 16.30 wib.

4. Asas tidak menggunakan kekerasan. Negara anggota harus menjauhkan penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain.
5. Setiap negara anggota harus memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
6. Asas kepatuhan negara yang bukan negara anggota PBB. Apabila diperlukan untuk perdamaian dan keamanan internasional walaupun negara tersebut bukan anggota PBB tetapi negara tersebut tetap harus bertindak menurut dengan asas-asas perserikatan bangsa-bangsa.
7. PBB tidak boleh mencampuri yuridiksi negara anggota. Asas ini dibatasi oleh tindakan pemaksaan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan yang diatur dalam Bab VII Piagam PBB.³⁸

Tujuan PBB terdapat dalam Mukadimah Piagam PBB dan juga diatur di dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak, hak tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan hak untuk menetapkan nasib sendiri.
3. Menjalinkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, budaya, sosial, dan kemanusiaan demikian pula dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, Bahasa, atau agama.

³⁸Pawiroputro, Ekram. 1995, **Organisasi Internasional Global**, Yogyakarta: Laboratorium PMP dan KN FPIPS-IKIP Yogyakarta, hlm 82.

4. Sebagai pusat dalam penyelarasan segala tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi setiap manusia, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, agama, dan bahasa, hak atas kebebasan atau kemerdekaan fundamental.
6. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

2.3.4 Struktur Organisasi PBB

Berdasarkan pasal 7 Piagam PBB, maka PBB memiliki 6 organ utama yang memiliki kedudukan yang sederajat yaitu:

1. Majelis Umum (*General Assembly*)

Majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari semua negara anggota PBB. Majelis ini mengadakan pertemuan setiap tahunnya di bawah pimpinan negara-negara anggota yang telah dipilih. Pada masa periode dua minggu awal di setiap sesi, semua anggota majelis memiliki kesempatan berpidato di hadapan majelis yang biasanya diawali pidato pertama oleh Sekretaris Jenderal dan diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama majelis umum PBB diadakandi Westminster Central Hall di London pada tanggal 10 Januari 1946 dengan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.

Tugas dan kekuasaan majelis umum terbagi dalam 8 golongan, yaitu:³⁹

- 1) Pelaksaaan perdamaian dan keamanan internasional
- 2) Kerja sama di dalam bidang perekonomian dan masyarakat internasional
- 3) Sistem perwakilan internasional

³⁹Diakses dari <https://dokumen.tips/documents/proses-masuknya-negara-menjadi-anggota-pbb.html>, tanggal 8 Desember 2017, pukul 09.07 wib.

- 4) Keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri
- 5) Urusan keuangan
- 6) Penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota
- 7) Perubahan piagam
- 8) Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain

Majelis Umum (*General Assembly*) membentuk organ-organ subsider untuk membantu tugasnya, struktur dari organ-organ dibawah ini berada dibawah Majelis Umum. Beberapa contoh organ-organ tersebut adalah UNICEF, UNCTAD, UNESCO, UNDP, UNHCR, dan lain-lain. Organ-organ ini bersifat non permanen dan jika Majelis Umum sudah tidak membutuhkan organ-organ tersebut lagi maka dapat dibubarkan.⁴⁰

2. Dewan Keamanan (*Security Council*)

Dewan Keamanan PBB mempunyai tugas menjaga keamanan dan juga perdamaian antar negara. Badan PBB yang lain hanya dapat memberikan suatu rekomendasi kepada para anggota PBB, sementara Dewan Keamanan mampu mengambil keputusan yang wajib dilaksanakan para anggota PBB di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan melaksanakan pertemuannya yang pertamanya pada tanggal 17 Januari Tahun 1946 bertempat di Church House, London. Keputusan yang ditetapkan dari Dewan Keamanan dinamakan Resolusi Dewan Keamanan PBB.⁴¹

Dalam hal menjaga perdamaian internasional dan juga keamanan internasional PBB menyerahkan tugas itu kepada dewan keamanan. Tetapi dengan syarat, segala tindakan yang

⁴⁰Dr. Sefriani, op. cit. hlm 201

⁴¹Diakses dari <http://www.edukasinesia.com/2016/06/apa-itu-pbb-perserikatan-bangsa-bangsa-penjelasan-terlengkap-mengenai-pbb.html>, tanggal 08 Maret 2018, pukul 09.00 wib.

dewan keamanan ambil harus selaras dengan tujuan dan asas-asas PBB, tugas serta kewajiban dewan keamanan dibagi atas beberapa golongan, yaitu:⁴²

- 1 Menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang damai, yaitu dengan didasari cara yang berdasarkan atas persetujuan yang sukarela atau dengan paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
- 2 Mengambil suatu tindakan jika adanya ancaman perdamaian dan jika adanya perbuatan yang merupakan penyerangan.

Dewan Keamanan PBB mempunyai beberapa fungsi yaitu:⁴³

1. Menjaga keamanan internasional dan perdamaian internasional yang sesuai dengan asas-asas dan tujuan PBB.
2. Menyelidiki pada setiap adanya persengketaan atau suatu situasi yang memungkinkan menimbulkan pergeseran internasional.
3. Mengusulkan suatu metode-metode tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa atau syarat penyelesaian.
4. Merumuskan dan menetapkan suatu rencana-rencana yang berguna untuk suatu sistem mengatur persenjataan
5. Menentukan pada saatnya ada suatu ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu tindakan agresi serta mengusulkan tindakan apa yang harus diambil.
6. Mengusulkan untuk menetapkan suatu sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lainnya yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan aggressor.
7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang aggressor
8. Mengusulkan anggota-anggota yang baru dan juga syarat-syarat dengan negara-negara mana saja yang dapat menjadi pihak dalam status mahkamah internasional.

⁴²Diakses dari <http://www.un.org/en/sc/>, tanggal 09 Februari 2018, pukul 09.50 wib.

⁴³Diakses dari <http://www.un.org/en/sc/about/>, tanggal 10 Februari 2018, pukul 10.20 wib.

9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”.
10. Mengusulkan pengangkatan seorang sekretaris jendral kepada majelis umum, dan bersama-sama dengan majelis umum mengangkat para hakim dari mahkamah internasional.
11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum

Dewan Keamanan juga membentuk organ-organ bersifat non permanen yang berarti dapat dibubarkan jika sudah tidak diperlukan seperti Unforces InCyprus, Unforces In Palestine, dan organ-organ lainnya yang berfungsi untuk membantu kelancaran tugas Dewan Keamanan yaitu memelihara perdamaian keamanan internasional.

3. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional atau (*The International Court of Justice*) merupakan organisasi hukum utama di dalam PBB. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda yang didirikan pada tahun 1945 dan mulai bertugas sejak tahun 1946. Mahkamah Internasional adalah suatu badan kehakiman yang terpenting di dalam PBB. Mahkamah Internaional merupakan pengganti Mahkamah Internasioanl Permanen (*Permanent Court of International Justice*). Mahkamah Internasional adalah badan pengadilan internasional yang bersifat tetap dan bertugas atau mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atau perselisihan antar negara yang diajukan kepadanya.

Mahkamah Internasional mempunyai yuridiksi atau kewenangan yang bersumber dari hukum internasional. Sumber-sumber hukum Mahkamah Internasional ada di pasal 31 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional:⁴⁴

⁴⁴Pasal 31 Statuta Mahkamah Internasional.

1. Perjanjian Internasional
2. Kebiasaan Internasional
3. Prinsip-prinsip /Asas-asas Hukum Umum
4. Keputusan pengadilan & Pendapat para sarjana terkemuka
(*Doctrine*)

Mahkamah Internasional mempunyai yuridiksi atau kewenangan yang bersumber dari hukum internasional yang sudah dijelaskan diatas. Yuridiksi ini menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa internasional, yuridiksi itu meliputi sebagai berikut:

1. Memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya (*contentious case*)
2. Memberikan pendapat atau opini yang bersifat nasehat (*advisory opinion*)

4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

Dewan Perwalian PBB atau *United Nations The Trusteeship Council* adalah sebuah sistem perwalian internasional yang telah lebih dahulu didirikan oleh anggota PBB bertugas untuk mengatur pemerintah daerah-daerah di bawah pengawasan PBB yang disebut “daerah-daerah perwalian”.

Dalam Pasal 77 Piagam PBB disebutkan bahwa adanya tiga daerah yang berada di bawah perwalian yaitu:

1. Daerah yang dulu sewaktu LBB (Liga Bangsa-Bangsa) merupakan merupakan daerah mandat.
2. Daerah-daerah yang akan dipisahkan dari negara-negara musuh sekutu karena akibat Perang Dunia ke II.
3. Daerah-daerah yang negara tersebut mempunyai kemauan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahnya yang ada dalam sistem perwalian.

Tujuan Dewan Perwalian adalah sebagai berikut:

1. Memelihara perdamaian serta keamanan internasional
2. Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian sehingga mereka mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan
3. Memberikan suatu dorongan agar menghormati dan mengakui adanya hak-hak manusia dari masyarakat internasional.
4. Memastikan perlakuan yang sama juga adil di setiap daerah perwalian dalam persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan komersial untuk semua para anggota PBB dan kebangsaan-kebangsaan mereka, dan perlakuan yang adil bagi semua anggota dan bagi semua bangsa dengan keadilan di dalam mengatur daerah-daerah yang di ambil dari negara-negara sekutu akibat perang dunia kedua dan yang secara sukarela ditempatkan di bawah sistem perwalian.

Dewan Perwalian sudah tidak aktif lagi semenjak tahun 1994 setelah kemerdekaan Palau sebagai satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa pada saat itu.⁴⁵

5. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*)

Dewan Ekonomi dan Sosial atau *Economic and Social Council* (ECOSOC) adalah badan PBB yang khusus menangani masalah perekonomian dan sosial. ECOSOC membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional serta pembangunan. Hingga saat ini ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semua anggotanya dipilih oleh Majelis Umum dengan masa jabatan tiga tahun. Sedangkan Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilih diantara dari kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu setahun sekali yaitu pada bulan Juli untuk empat sesi satu minggu. Sejak tahun 1998, ECOSOC mengadakan pertemuan lain dengan menteri keuangan

⁴⁵Diakses dari <http://www.un.org/en/mainbodies/trusteeship/>, tanggal 20 Oktober 2017, pukul 22.47 wib

sebagai komite kunci dari Dana Moneter Internasional (IMF Bank Dunia setiap bulan April.

Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan juga konferensi-konferensi tentang masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain di seluruh dunia.
2. Mengembangkan dan melaksanakan sosial, ekonomi, dan, politik
3. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada Sidang Umum kepada mereka dan anggota PBB.

6. Sekretariat Jendral (*Secretary General*)

Sekretariat PBB merupakan salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul dari Dewan Keamanan PBB setiap anggota dapat memveto, untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Sekretaris Jenderal dibantu oleh staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia.⁴⁶

Sekretariat berperan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Berinisiatif meminta perhatian dewan keamanan atas masalah yang dapat mengancam keamanan internasional dan meminta kepada dewan keamanan agar masalah tersebut dicantumkan pada agenda dewan keamanan dan majelis umum.
2. Menyiapkan anggaran belanja yang selanjutnya akan diajukan kepada majelis umum untuk mendapatkan persetujuan.

Sekretaris-Jenderal mempunyai tugas yang sekaligus membantu administrasi operasi penjaga perdamaian, penyelesaian sengketa internasional, mengadakan konferensi

⁴⁶Diakses dari <https://www.un.int/indonesia/Indonesia/speeches/sc/1995-1996/wisnumurti.html>, tanggal 20 Oktober 2017, pukul 22.58 wib

internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif.⁴⁷

Fungsi-fungsi sekretaris jendral

- 1) Sebagai Kepala administratif dari PBB
- 2) Berinisiatif membawa suatu masalah dihadapan dewan keamanan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
- 3) Membuat laporan tahunan dan setiap laporan tambahan yang perlu kepada majelis umum mengenai pekerjaan PBB.

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa

- 1) Trygve Lie, Norwegia (1945-1953)
- 2) Dag Hammarskjöld, Swedia (1953-1961)
- 3) U Thant, Burma (1961-1972)
- 4) Kurt Waldheim, Austria (1972-1982)
- 5) Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982-1992)
- 6) Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992-1997)
- 7) Kofi Annan, Ghana (1997-2007)
- 8) Ban Ki-moon, Korea Selatan (2007-2017)
- 9) Antonio Guterres, Portugal (2017)

2.3.5 Organisasi Internasional PBB

PBB juga mempunyai organ yang bersifat khusus (*specialized agency*) diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 63 Piagam PBB yang merupakan organisasi independen yang anggarannya tidak berasal dari anggaran PBB melainkan dari para anggotanya sendiri dan

⁴⁷Dr. Sefriani, 2016, **Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer**, Jakarta, Rajawali Press, hlm 201.

dibentuk melalui perjanjian internasional oleh negara-negara merdeka yang tidak harus dari anggota PBB. Organ-organ ini seperti WHO, IMF, ILO, ICAO, dan lain lain. Organ-organ tersebut bekerja sama (mempunyai hubungan koordinatif) dengan Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*) atau biasa disingkat menjadi ECOSOC tetapi kedudukan organ-organ tersebut tidak berada dibawah ECOSOC. Organ-organ ini berbeda dari organ-organ sebelumnya, organ ini bersifat permanen dan dapat dibubarkan jika hanya para anggota organisasi tersebut menghendaki. Organ-organ ini memiliki status sebagai subjek hukum internasional (*independent*).

Organ-organ yang berada dibawah Majelis Umum dan Dewan Keamanan semua bersifat *subsidiary organ* dan memiliki hubungan subordinat dengan PBB serta memakai anggaran dari PBB. Anggota yang berada dalam organ-organ tersebut juga harus berasal dari anggota PBB. Organ-organ yang bersifat subsidiary organ ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2, Pasal 22, dan Pasal 29 Piagam PBB. Organ-organ ini mempunyai nama yang dimulai dengan UN contohnya seperti UNICEF, UNESCO, UNFORCES IN PALESTINE, dan lain-lain. Organ-organ ini juga tidak memiliki status sebagai subjek hukum internasional.

2.3.6 UNHCR

PBB juga mempunyai organisasi khusus yang menangani masalah pengungsi. Organisasi yang khusus menangani masalah pengungsi ini bernama *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Organisasi ini bermarkas di Jenewa, Switzerland yang didirikan pada 14 Desember 1950. UNHCR diberikan mandat oleh PBB untuk memimpin dan mengoordinasi aksi internasional untuk melindungi pengungsi dan

menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi di seluruh dunia.⁴⁸

The Convention 1951 Relating to the Status of Refugees adalah dasar dari hukum internasional dalam hal mengenai perlindungan terhadap pengungsi. Pada bulan Juli 1951 saat diselenggarakan konferensi diplomatic di Jenewa, konvensi ini disahkan. Pada awalnya, konvensi 1951 ini hanya terbatas untuk melindungi pengungsi Eropa sebagai dampak dari adanya perang dunia II.⁴⁹

Konvensi 1951 ini mendeskripsikan definisi pengungsi dan menjadi instrument dasar UNHCR dalam menjaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi. Dasar utama dari konvensi 1951 ini adalah prinsip *non-refoulment* yang tercantum dalam pasal 33, dinyatakan seorang pengungsi sebaiknya tidak dikembalikan ke Negara dimana pengungsi akan menghadapi ancaman serius atas hidup dan kebebasannya.⁵⁰

2.3.7 OHCHR

PBB mempunyai organisasi untuk persatuan hak asasi manusia yaitu Komisi Persatuan Hak Asasi Manusia. Namun, pada 15 Maret 2006 Majelis Umum PBB memutuskan untuk menciptakan sebuah organisasi Hak Asasi Manusia yang baru yaitu *The Office Of The United Nations High Commissioner for Human Right* (OHCHR) atau Dewan Hak Asasi manusia sebagai penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dewan Hak Asasi Manusia beranggotakan 47 negara ini menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia yang

⁴⁸Diakses dari <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2.html> , tanggal 21 Oktober 2013 wib

⁴⁹United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The 1951 convention Relating to the status of Refugees and its 1967 Protocol* (Geneva: UNHCR)

⁵⁰United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)

beranggotakan 53 negara sebelumnya. Menurut kesepakatan, badan ini telah disetujui oleh 170 anggota dari 190 anggota.⁵¹

Sesuai Resolusi 60/251 salah satu pentingnya fungsi Dewan HAM disebutkan “*to undertake a universal periodic review (UPR), based on objective and reliable information, of the fulfillment by each State of its human rights obligations and commitments in a manner which ensures universality of coverage and equal treatment with respect to all States.*” Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan UPR ini terdapat dalam resolusi Dewan HAM 5/1 *on Institution-building of the United Nations Human Rights Council*.⁵²

Lembaga ini dapat meninjau situasi HAM di seluruh negara besar atau kecil dan akan dilaporkan setiap empat tahun sekali oleh masing-masing negara anggota PBB tanpa tergantung pada perjanjian HAM yang telah diratifikasi oleh tiap-tiap negara.⁵³ Resolusi 5/1 Dewan HAM tentang UPR lebih didasarkan pada Piagam PBB, UDHR, dan instrumen-instrumen HAM yang mana setiap negara peserta dan bukan Negara anggota menyanggupi dan berkomitmen dalam penegakan hak asasi manusia.

Pada laporan umum secara berkala yang dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk hak asasi manusia. Myanmar pada bulan Januari 2011 menyatakan pemerintah Myanmar tidak mengakui buruknya situasi hak asasi manusia di negara tersebut ataupun berkomitmen untuk mengambil tindakan perbaikan yang komprehensif. Bahkan sampai hari ini Myanmar juga belum mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Myanmar juga

⁵¹Diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>, tanggal 21 Oktober 01.46 wib

⁵²Rhona K. M. Smith, 2010, *Textbook on International Human Rights-Fourth Edition*, Oxford University Press, h. 61.

⁵³Rhona K. M. Smith, op. Cit. Hlm. 62

menyatakan bahwa etnis minoritas, Rohingya, tidak memiliki hak kewarganegaraan di Myanmar, sehingga status mereka adalah imigran gelap.⁵⁴

⁵⁴Diakses dari <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/001/2011/en/db0f9fd0-de19-4f3d-baac-81d78cd04b66/asa160012011en.pdf>, tanggal 21 Oktober 01.50 wib